

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Peran Kepala Kampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus di jalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi.

Menurut David Berry (2019:105), mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dalam peranan terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh yang memegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam sebuah kepemimpinan khususnya dalam sebuah daerah, dalam hal ini adalah Kepala Kampung tentu memiliki peran yang sangat besar dalam membangun desanya yang mana masyarakat telah memberikan amanah untuk menjadikan daerah tersebut jauh lebih meningkat dari sebelumnya, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, terdapat tiga indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pengawasan.

1. Peran Interpersonal

Pemerintah Kampung menyusun perencanaan Pembangunan Kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Kampung dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan seluruh masyarakat Kampung dengan semangat gotong royong. Masyarakat Kampung berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kampung. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung, pemerintah Kampung didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Kampung, Kepala Kampung dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan kampung mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Adapun rencana/agenda dari Kepala Kampung Tablasupa sendiri selama masa jabatannya pembangunan infrastruktur jalanan merupakan program prioritas kampung tersebut dikarenakan sangat minimnya fasilitas jalanan yang ada di Kampung Tablasupa sendiri, serta pembangunan yang lainnya yakni membangun irigasi bagi masyarakat tani yang memiliki anggaran yang cukup besar.

Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang

dilakukan oleh peneliti kepada 4 orang narasumber yakni, Kepala Kampung, Sekertaris Kampung, KAUR Keuangan Kampung, ketua BPD. Berdasarkan peran interpersonal dalam Perencanaan pembangunan, pada peran Kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai, dalam penyusunan RPJM kampung melibatkan seluruh unsur masyarakat atau tidak, melalui wawancara yang dilakukan bersama Bpk. MS (Kepala Kampung) dan BPK. AY (sekertaris kampung) yang mengatakan bahwa:

“..tentu kita dalam Rencana pembangunan jangka menengah kampung kami melibatkan semua unsur masyarakat baik itu dari masyarakat, aparat kepolisian, aparat TNI serta tokoh adat, tokoh agama kita undang semua datang mengadakan pertemuan di balai kampung untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam pembangunan..” (hasil wawancara Bpk. MS, 15 Juni 2024)

“..kami dalam pembuatan RPJM memang selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, semua lapisan. Kita selalu ada musyawarah bersama dengan seluruh staf dan masyarakat mengenai apa saja kebutuhannya masyarakat kampung yang menkampungk..” (hasil wawancara Bpk. AY 15 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara di atas mengatakan bahwasannya pemerintah

kampung dalam melakukan rencana penyusunan pembangunan jangka menengah selalu melibatkan masyarakat kemudian hampir senada dengan yang dikatakan oleh BPK. HY selaku (KAUR keuangan) dan BPK. HO (ketua BPD) yang mengatakan bahwa:

*“..iya dek kita melibatkan masyarakat, bermusyawarah, tokoh adat, tokoh agama, kantibnas, babinsa kita undang, dan kepala dusun dan warganya untuk mewakili keseluruhan masyarakat..” (hasil wawancara
15 Juni 2024)*

*“semua tokoh terlibat pemerintah kampung, BPD, masyarakat semua terlibat untuk menyusun rencana pembangunan..”(hasil wawancara
15 Juni 2024)*

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya peran interpersonal dalam penyusunan rencana pembangunan kampung jangka menengah, pemerintah kampung selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, serta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan kampung diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah kampung.

Peran interpersonal kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai perencanaan pembangunan kampung sudah sesuai dengan ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pedoman pembuatan rencana pembangunan kampung. Melalui wawancara yang dilakukan bersama Bpk. MS (Kepala Kampung) dan Bpk. AY (sekertaris kampung) mengatakan bahwa:

“..pasti dek, kami melakukan RPJM berdasarkan pedoman yang ada sesuai dengan peraturan, seperti kita membuat ini RPJM berdasarkan hasil musyawarah antara pemerintah kampung dengan segala unsur yang ada di kampung..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..iye kita berdasarkan pedoman penyusunan RPJM Cuma bedanya ya

kita tidak pake team Bpk. AY menangani secara khusus karena kita juga kekurangan tenaga dan orang jadi yang menangani tetap staf kampung..”

Berdasarkan wawancara diatas mengatakan bahwasannya perencanaan pembangunan kampung yang dilakukan oleh pemerintah kampung sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Selanjutnya wawancara dilakukan bersama BPK. HY (KAUR keuangan) dan BPK. HO (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..setau saya iya karena RPJM ini ada agendanya mulai dari penyusunan sampai penetapan kemudian ada peninjauan ulang lagi..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..yang mengurus semua itu kan pemerintah kampung, dan memang sudah seharusnya mengikuti pedoman pembuatan RPJM, jdi seharusnya harus ikut pedomankan..”(hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan indikator peran interpsersonal dalam Perencanaan pembangunan, pada peran Kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai, kepuasan masyarakat berdasarkan RPJM yang telah ditetapkan oleh pemerintah kampung, melalui wawancara yang dilakukan bersama BPK. MS (Kepala Kampung) dan BPK. AY (sekertaris kampung) mengatakan bahwa:

“..untuk kepuasan masyarakat saya kurang tau pasti, tapikan kami sudah mendengar aspirasinya di wakili oleh beberapa masyarakat beserta kepala dusun/lingkungan jadi kami menyerap semua aspirasi, walaupun ada ketidak puasan ya karena kita memprioritaskan kebutuhan..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..saya yakin pasti tetap ada masyarakat yang tidak puas dengan hasil penyusunan perencanaan pembangunan ini karena tidak semua kita setujui, ada beberapa hal yang menurut kami dan yang lain masih belum perlu pembangunannya..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara di atas mengenai tingkat kepuasan masyarakat mengenai hasil dari rencana penyusunan pembangunan infrastruktur kampung, yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas di karenakan tidak semua aspirasi masyarakat di tindak lanjutkan, melainkan pembangunan infrastruktur di tindak sesuai dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara oleh BPK. HY (KAUR keuangan) dan BPK. HO (ketua BPD) menagatakan bahwa:

“..saya kurang tau juga dengan kepuasan masyarakat tapi sejauh ini belum ada komentar mengenai pembangunan yang dilakukan pemerintah kampung jadi saya pikir tidak ada masalah mengenai kepuasan masyarakat..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..menurut saya beda-beda tingkat kepuasannya masyarakat karena pasti keinginannya mereka beda, ada yang sudah puas dan saya yakin juga ada yang belum merapa puas dengan RPJM ini..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai tingkat kepuasan masyarakat kampung terkait infrastruktur yang disetujui dalam pembangunan kampung yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas di karenakan tidak semua aspirasi masyarakat di tindak lanjutkan, melainkan pembangunan infrastruktur di tindak sesuai dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut, sedangkan

masyarakat sendiri paham dan maklum terkait dengan prioritas pembangunan yang layak di dahulukan.

Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, pada peran Kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai, bagaimana pemerintah kampung melakukan rencana pembangunan kampung bersama masyarakat. Melalui wawancara yang dilakukan bersama BPK. MS (Kepala Kampung) dan BPK. AY (sekertaris kampung) mengatakan bahwa:

“..kami mengundang seluruh lapisan masyarakat diwakili oleh beberapa tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh yang dituakan, serta aparat kantibnas dan babinsa untuk melakukan musyawarah diskusi dua arah mengenai pembangunan kampung..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..kami melakukan tudang sipulung dengan tokoh-tokoh masyarakat diskusi bersama mengenai pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat..” (hasil wawancara 25 Novemer 2019)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pemerintah kampung melakukan rencana pembangunan kampung bersama masyarakat kampung dengan bentuk diskusi dua arah secara formal dengan musyawarah dilakukan di kantor kampung itu sendiri. Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan bersama BPK. HY (KAUR keuangan) dan BPK. HO (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..kami selalu melakukan musyawarah kepada masyarakat, apa lagi membicarakan tentang rencana pembangunan kampung, kami selalu melakukan musyawarah. Pemerintah tidak boleh seenaknya menetapkan pembangunan tanpa musyawarah dari lapisan masyarakat..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..rencana pembangunannya seperti biasa, diadakan musyawarah dengan masyarakat, tokoh yang berkepentingan semua kita bicarakan dengan baik..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah kampung melakukan rencana pembangunan kampung bersama masyarakat itu dengan bentuk diskusi dua arah secara formal dengan musyawarah dilakukan di kantor kampung bersama masyarakat yang ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan kampung di Kampung Tablasupa Distrik Depapre kabupaten Jayapura. Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, pada peran Kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai, program-program prioritas pemerintah kampung dalam perencanaan pembangunan Kampung Tablasupa. Melalui wawancara yang dilakukan bersama BPK. MS (Kepala Kampung) dan BPK. AY (sekertaris kampung) mengatakan bahwa:

“..kami memiliki banyak program pembangunan kampung, seperti pembangunan pemerataan infrastruktur jalanan, yang mana kita liat sendiri jalanan di sini tidak bisa di akses dengan kendaraan roda empat, kemudian masyarakat di sini juga masih kekurangan MCK jadi banyak program tapi belum semua kita mampu jalankan sekaligus..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..ada beberapa program yang menjadi acuannya pemerintah kampung, tapi kita untuk saat ini fokus ke pembangunan jalanan, karena di kampung ini masih kurang sekali akses jalanan yang di miliki..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengatakan bahwasnya kampung memiliki banyak program pembangunan sedangkan prioritas pembangunan Kampung Tablasupa yakni akses jalanan serta pemerataan

infrastruktur jalanan yang masih sangat kurang dan di bawah rata-rata.

Kemudian selanjutnya wawancara dilakukan bersama BPK. HY (KAUR keuangan) dan BPK. HO (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..sebenarnya banyak pembangunan yang harus dilakukan oleh kampung

Tablasupa ini namun, dengan keterbatasan dana tidak bisa dilakukan sekaligus apa lagi pembangunan infrastruktur jalanan ini biayanya tidak sedikit jadi untuk memudahkan masyarakat prioritas pembangunan sekarang itu pemerataan jalanan..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..program prioritas pemerintah kampung saat ini jalanan yang sangat dibutuhkan, karena jalanan ini menjadi akses pembangun ekonomi masyarakat..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Selanjutnya melalui wawancara yang dilakukan bersama beberapa masyarakat AD, SI dan NL mengatakan bahwa:

“..setau saya program prioritasnya pemerintah kampung sekarang ini itu jalanan, karena kami juga masyarakat sangat berharap pemerataan jalan ini yang susah sekali..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..saya kurang tau dek apa saja programnya pemerintah kampung mengenai pembangunan..” (hasil wawancara 15 Juni 2024) “..saat ini yang saya liat pemerintah kampung memang sedang berusaha memperbaiki jalanan kampung..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan keseluruhan wawancara diatas pada indikator perencanaan dapat disimpulkan bahwasannya dalam penyusunan rencana pembangunan kampung jangka menengah, pemerintah kampung selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, seta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan kampung diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah kampung. dan mengenai perencanaan pembangunan kampung menurut aparat kampung yang dilakukan oleh pemerintah kampung sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang ada

berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia.

Adapun tingkat kepuasan masyarakat kampung terkait infrastruktur yang disetujui dalam pembangunan kampung yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas di karenakan tidak semua aspirasi masyarakat di tindak lanjutkan, melainkan pembangunan infrastruktur di tindak sesuai dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut, sedangkan masyarakat sendiri paham dan maklum terkait dengan prioritas pembangunan yang layak di dahulukan. pemerintah kampung melakukan rencana pembangunan kampung bersama masyarakat itu dengan bentuk diskusi dua arah secara formal dengan musyawarah dilakukan di kantor kampung bersama masyarakat yang ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan kampung di Kampung Tablasupa Distrik Depapre kabupaten Jayapura. sedangkan prioritas pembangunan Kampung Tablasupa yakni akses jalanan serta pemerataan infrastuktur jalanan yang masih sangat kurang dan di bawah rata-rata.

2. Peran Informasional

Kepala Kampung mengokordinasikan kegiatan pembangunan Kampung yang dilaksanakan oleh perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung eliputi:pembangunan Kampung berskala lokal Kampung; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Kampung. Pelaksanaan pembangunan Kampung yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Kampung,

kerjasama antar Kampung dan/atau kerjasama Kampung dengan pihak ketiga.Kepala Kampung mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Kampung terhitung sejak ditetapkan APB Kampung. Pembangunan Kampung yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Kampung, program sektor dan/atau program daerah di Kampung dicatat dalam APB Kampung.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Kampung, maka Kampung mempunyai kewenangan untuk mengurus.Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Kampung tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Kampung dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati/walikota.

Kepala Kampung mengokordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Kampung. Pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat kampung dan/ atau unsur masyarakat Kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan

wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 narasumber yakni, Kepala Kampung, Sekertaris Kampung, dan KAUR Keuangan Kampung, Ketua BPD dan 3 masyarakat dari Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan indikator peran informasional dalam Pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai, proses penetapan pelaksana kegiatan pembangunan. Melalui wawancara yang dilakukan bersama BPK. MS (Kepala Kampung) dan BPK. AY (sekertaris kampung) mengatakan bahwa:

“..untuk menetapkan pelaksana kegiatan itu kami gunakan orang disini, ikut dalam penyusunan rencana pembangunan kampung kemarin, yang paham dan memiliki kemampuan yang mumpuni dan tidak diluar kampung ini sendiri..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..penetapan pelaksanaan itu dilakukan oleh bapak Kepala Kampung, mempertimbangkan beberapa indikator seperti paham akan tugas sebagai pelaksana pembangunan, kemudian bukan orang dari luar kampung supaya lebih mudah untuk di kontrol, selebihnya tergantung Kepala Kampung..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara di atas bahwasannya proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh Kepala Kampung berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut Kepala Kampung memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan Kampung Tablasupa. Kemudian selanjutnya wawancara bersama BPK. HY (KAUR keuangan) dan BPK. HO (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..untuk pelaksana kegiatan pembangunan itu pak Kepala Kampung yang tunjuk, biasanya juga orang-orang dekat yang dipercayakan bahkan aparat kampung sendiri juga agar lebih mudah untuk mengontrol proses pelaksanaan pembangunan kampung..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..pelaksana itu dari kampung, kami di BPD ini hanya bertugas sebagai pengawas saja tidak ikut dalam penetapan pelaksana pembangunan..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasannya proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh Kepala Kampung berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut Kepala Kampung memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan Kampung Tablasupa. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan di karenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut.

Berdasarkan indikator peran informasional dalam pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Kecamatan Tablasupa Kabupaten Jayapura mengenai, proses penyusunan rencana kerja pelaksana pembangunan dan apa saja yang menjadi fokus pada rencana kerja tersebut, melalui wawancara yang dilakukan bersama BPK. MS (Kepala Kampung) dan BPK. AY (sekertaris kampung) mengatakan bahwa:

“..dalam kegiatan penyusunan rencana kerja itu kami diskusikan apa saja yang akan dikerjakan, berapa biaya yang harus dikeluarkan pembangunan tersebut, lokasi mana saja yang akan dilakukan pembangunan dan tenaga kerja yang digunakan dalam pembangunan demikian..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..dalam kegiatan penyusunan rencana kerja kami banyak membahas tata

pelaksana pembangunan mulai dari biaya hingga tenaga kerja serta daftar pelaksana kegiatan semua kami bahas, untuk membuat kegiatan jelas dan terarah..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara di atas dapat di lihat bahwa dalam kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah kampung bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan Kampung Tablasupa, selanjutnya wawancara dilakukan bersama BPK. HY (KAUR keuangan) dan BPK. HO (ketua BPD) yang mengatakan:

“..ya itu kita rencanakan semua kegiatan yang akan dilakukan, daftar daftar kegiatan apa saja, kemudian bagaimana prosesnya, selanjutnya untuk fokus mungkin lebih ke biaya, karena pembangunan kita harus berdasarkan biaya yang menjadi penentu pembangunan itu seberapa besar pembangunan yang akan dibuat..”(hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..dalam proses ini semuanya dibahas secara detail baik kordinasi pelaksana dengan pengawas, kemudian dari rincian biaya dan semuanya diproses semua disini..”(hasil wawancara 15 Juni 2024)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai peraninformasional dalam rencana kerja pelaksanaan pembangunan Kampung Tablasupa kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah kampung bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan Kampung Tablasupa dan menjadi fokus pembahasan yakni biaya pembangunan. Namun masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan kampung.

Berdasarkan indikator peran informasional dalam pelaksanaan pembangunan, pada peran Kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai cara pemerintah kampung dalam melakukan sosialisasi dokumen hasil rencana kerja pelaksanaan pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat kampung, dalam wawancara yang dilakukan bersama BPK. MS (Kepala Kampung) dan BPK. AY (sekertaris kampung) mengatakan bahwa:

“..untuk sosialisasi ini kita lakukan melalui musyawarah-musyawarah dan pertemuan, dalam pertemuan kampung bersama kepala dusun kemudian dusun ditugaskan untuk menginformasikan lingkungannya terhadap pembangunan yang dilakukan, kemudian juga dari musyawarah kelompok-kelompok yang ada di kampung, kelompok tani dan sebagainya, kemudian kita juga paparkan pada papan informasi dan baliho kampung kegiatan dan biaya semua lengkap jadi siapa saja yang lewat bisa melihat..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..kita ada baliho didepan kantor yang sangat besar semuanya jelas mengenai pembangunan dan kegiatan yang akan dilaksanakan bersama rincian biayanya jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait keterbukaan pemerintah kampung..(hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya peran informasional dengan melaksanakan sosialisasi terkait dengan rencana kerja pelaksanaan pembagunan dan kegiatan kampung di informasikan melalui pertemuan, dan musyawarah yang dilakukan baik itu kelompok maupun musyawarah lingkungan serta adanya papan informasi dan baliho yang disediakan dengan rincian kegiatan dan pembiayaan. Kemudian wawancara bersama BPK. HY (KAUR keuangan) dan BPK. HO (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..kalau untuk sosialisasi itu kita memang siapkan, karena bentuk transparansinya kampung dan memang sudah wajib untuk bkin laporan bentuk baliho..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..sosialisasi-sosialisasi banyak caralah, termasuk juga pemberitahuan ini sudah disiapkan di depan kantor kampung sangat besar mengenai rincian kegiatan dan rincian biaya semua lengkap..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama beberapa masyarakat mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kampung mengenai rencana kerja pelaksanaan pembangunan yakni AD, SI dan NL mengatakan bahwa:

“..iye kalau sosialisasi ada memang pemberitahuan dari hasil musyawarah ada juga di dpan kantor kampung baliho informasi kegiatankegiatan semuanya..” (hasil wawancara 15 Juni 2024) *“..saya jarang ikut musyawarah tapi untuk tau pembangunan saya tau, informasi sekarang sangat mudah tersebar..”* (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..kalau untuk sosialisasi pemerintah kampung, iye adaji Kepala Kampung kalau ada kegiatan atau sekedar minum kopi sama-sama pasti selalu memberitahukan dibantu juga dengan papan informasi yang disediakan di depan kantor kampung..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kampung terkait rencana kerja pelaksanaan pembangunan yang ada di Kampung Tablasupa melalui musyawarahmusyawarah dan pertemuan yang diadakan oleh pemerintah kampung kemudian juga Kampung Tablasupa dilengkapi dengan informasi rencana pelaksanaan pembangunan di paparkan pada baliho yang dibuat oleh pemerintah kampung agar terjalin keterbukaan pada pemerintah dan masyarakat kampung.

Berdasarkan indikator peran informasional dalam pelaksanaan pembangunan, pada peran Kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai pemerintah kampung dalam melakukan pengadaan tenaga kerja serta bahan material pada pembangunan infrastruktur jalan. Melalui wawancara bersama BPK. MS (Kepala Kampung) dan BPK. AY (sekertaris kampung) mengatakan bahwa:

“..untuk pengadaan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur jalan kita serahkan ke ahlinya. kemudian kita menentukan bahan dan mendata berapa banyak, kemudian kita juga memanfaatkan sumberdaya masyarakat dalam bergotong royong bekerja sama..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..untuk pengadaan tenaga kerja memang sudah ada di siapkan karena kalau kita mau rekrut masyarakat ya tidak bisa karena pembangunan jalanan itu beda dengan bangun kantor atau bangunan yang lainnya..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dalam melakukan pengadaan tenaga kerja yakni memang sudah ahli dalam infrastruktur pembuatan jalan, dan juga sumberdaya manusia kampung dilibatkan untuk membantu pembangunan, dan untuk pengadaan barang di data dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan BPK. HY (KAUR keuangan) dan BPK. HO (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..untuk pengadaaan tenaga kerja sepertinya bekerja sama dengan kabupaten untuk pengadaaan tenaga kerj infrastruktur jalanan karena tidak sembarang, klo materialnya sama juga..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..pengadaaan tenaga kerja itu pemerintah kampung dengan pelaksana yang urus, tapi saya liat karena jalanan yang dibangun tidak bisa sembarang orang jadi yang memang pekerjaannya membangun jalanan kita serahkan ke ahlinya..”(hasil wawancara 15 Juni 2024)

Selanjutnya dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat terkait mengenai pengadaan tenaga kerja dan pengadaaan material yakni AD, SI, dan NL yang mengatakan bahwa:

“..saya kurang tau dek untuk pengadaan tenaga kerja dan materialnya karena tidak ada informasi soal yang pengandaan..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..tidak paham dek untuk hal seperti itu..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..untuk itu juga saya kurang tau karena mereka tidak menginformasikan sampai sedetail itu..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran informasional dalam melakukan pengadaan tenaga kerja yang berasal dan memang sudah ahli dalam infrastruktur pembuatan jalan, dan juga sumberdaya manusia kampung dilibatkan untuk membantu pembangunan, dan untuk pengadaan barang di data dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat tidak paham dikarenakan keterbatasan informasi yang diberikan mengenai pengadaan.

Berdasarkan indikator peran informasional dalam pelaksanaan pembangunan, pada peran Kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kampung. melalui wawancara yang dilakukan bersama BPK.

MS (Kepala Kampung) dan BPK. AY mengatakan bahwa:

“..partisipasi dari masyarakat kampung sendiri Puji Tuhan cukup baik, dengan menerima pembangunan dan mendukung pemerintah kampung saya kira itu sudah sangat cukup untuk masyarakat berpartisipasi apa lagi ada

bantuan dari masyarakat kami sangat senang..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..partisipasinya masyarakat terhadap pembangunan Puji Tuhan sejauh ini baik..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalanan kampung baik dan mendukung penuh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama BPK. HY (KAUR keuangan) dan BPK. HO (ketua BPD) yang mengatakan bahwa:

“..partisipasi masyarakat alhamdilillah sangat antusias, mulai dari perencanaan penyusunan pembangunan kampung, kemudian hingga pelaksanaan ini masyarakat membantu pemerintah kampung dengan moral maupun moril..”(hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..partisipasinya masyarakat ini sebenarnya tidak terlalu banyak uji untuk pelaksana pembangunan karena kan sudah ada mi ditentukan pekerjaanya..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator pelaksanaan, pada peran Kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre kabupaten Jayapura dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh Kepala Kampung berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut Kepala Kampung memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan Kampung Tablasupa. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan di karenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Dan mengenai rencana kerja pelaksanaan pembangunan Kampung Tablasupa kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah kampung bersama pelaksana untuk

membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan Kampung Tablasupa dan menjadi fokus pembahasan yakni biaya pembangunan.

Namun masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan kampung. Kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kampung terkait rencana kerja pelaksanaan pembangunan yang ada di Kampung Tablasupa melalui musyawarah-musyawarah dan pertemuan yang diadakan oleh pemerintah kampung kemudian juga Kampung Tablasupa dilengkapi dengan informasi rencana pelaksanaan pembangunan di paparkan pada baliho yang dibuat oleh pemerintah kampung agar terjalin keterbukaan pada pemerintah dan masyarakat kampung. untuk melakukan pengadaan tenaga kerja yang berasal dan memang sudah ahli dalam infrastruktur pembuatan jalan, dan juga sumberdaya manusia kampung dilibatkan untuk membantu pembangunan, dan untuk pengadaan barang di data dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Sedangkan untuk masyarakat tidak paham dikarenakan keterbatasan informasi yang diberikan mengenai pengadaaan. Serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalanan kampung baik dan mendukung penuh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Peran Pengambil Keputusan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Kampung melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Kampung. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui

pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kampung. Masyarakat Kampung berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kampung. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Kampung menjadi dasar pembahasan musyawarah Kampung dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kampung.Pemantauan pembangunan Kampung oleh masyarakat Kampung dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Kampung dan tahapan pelaksanaan pembangunan Kampung. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Kampung dan RKP Kampung.

Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Kampung. Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 narasumber yakni, Kepala Kampung, Sekertaris Kampung, KAUR Keuangan Kampung, ketua BPD dan 3 masyarakat dari Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan indikator peran pengambilan keputusan dalam pengawasan dan pemantauan pembangunan kampung, pada peran Kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai seperti apa pemerintah kampung dalam melakukan pengawasan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur

jalan, melalui wawancara yang dilakukan bersama BPK. MS (Kepala Kampung) dan BPK. AY (sekertaris kampung) mengatakan:

“..pemerintah kampung itu selalu mengontrol dan mengawasi langsung pembangunan, turun kelapangan bersama pekerja untuk mengecek seberapa persen tingkat penyelesaian dan memeriksa pembiayaan dan sebagainya..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..kampung sebagai penanggung jawab tentunya harus memberikan pengawasan dan pengontrolan pembangunan yang ketat, untuk pembangunan hampir setiap hari ada pemeriksaaan dari pemerintah kampung untuk mengontrol walaupun sudah ada Bpk. AY bertugas..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait mengenai seperti apa pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah kampung terhadap pembangunan infrastruktur jalanan kampung, yakni dengan melakukan pegawasan dan pemantauan langsung dilapangan bersama pekerja. Kemudian wawancara selanjutnya bersama BPK. HY (KAUR keuangan) dan BPK. HO (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..pemerintah kampung melakukan pengawasan dan pemantauan itu secukuBpk. HYya, karena kan pasti ada juga laporan yang masuk jadi tinggal disamakan saja apakah benar atau tidak ini..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..kami bekerja sama dengan pemerintah kampung untuk melakukan pengawasan dan pemantauan, jadi kordinasi BPD dengan kampung itu menjadi hal yang sangat penting..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan peran pengambil keputusan dalam pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang

masih menganggap pemerintah kampung masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan.

Berdasarkan indikator peran pengambil keputusan pengawasan dan pemantauan pembangunan kampung, pada peran Kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai, keterlibatan Badan permusyawaratan kampung (BPD) dalam melakukan pengawasan dan pemantauan. Melalui wawancara yang dilakukan bersama BPK. MS (Kepala Kampung) dan BPK. AY (sekertaris kampung) mengatakan bahwa:

“...pasti karena BPD memang tugas dan fungsinya sebagai pengawas pembangunan oleh sebab itu pemerintah kampung dan BPD melakukan kordinasi dan pembagian tugas dalam melakukan pemantauan dan pengawasan..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..memang sudah tugas dan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan dan pemantauan jadi sudah seharusnya untuk terlibat..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait pean pengambil keputusan mengenai keterlibatan dari badan permusyawaratan kampung (BPD) dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa yakni BPD memang terlibat dan menjadi kewajiban fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama BPK. HY (KAUR keuangan) dan BPK. HO (ketua BPD) yang mengatakan bahwa:

“..BPD menjadi salah satu ujung tombak pengawasan dan pemantauan pembangunan yang ada di Kampung Tablasupa ini. BPD berkordinasi bersama pemerintah kampung dalam melaporkan jadian lapangan, jadi tidak

perlu khawatir ketika pemerintah kampung tidak datang mengawasi ada BPD yang merupakan tugas utamanya melakukan pengawasan.” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..keterlibatannya BPD ya pastilah, BPD kan tugas dan fungsinya memang mengadakan pengawasan dan pemantauan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai keterlibatan BPD dalam pengawasan dan pemantauan kerja pelaksana pembangunan infrastruktur jalanan kampung, sudah pasti terlibat dikarenakan sudah menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan kampung dalam pengawasan pembangunan, namun masyarakat masih tidak mengetahui akibat kurangnya pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri.

Berdasarkan indikator peran pengambil keputusan dalam pembangunan kampung, pada peran Kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai, partisipasi masyarakat kampung mengenai pengawasan dan pemantauan pembangunan infrastruktur jalanan kampung, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama BPK. MS (Kepala Kampung) BPK. AY (sekertaris kampung) mengatakan bahwa:

“..kalau untuk partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan sendiri saya kira masih kurang, mungkin karena mereka berpikir sudah ada yang bekerja kemudian di kontrol dengan mandor jadi tidak perlu lagi ada pengawasan, tapi ada juga beberapa masyarakat sadar akan pengawasan dan pemantauan..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan pemantauan masih agak kurang, masih kurang kesadaran akan hal tersebut..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai partisipasi masyarakat mengenai pengawasan dan pemantauan berdasarkan pemerintah kampung bahwasannya partisipasi masyarakat masih kurang baik itu kurang kesadaran dan kurang pengetahuan pentingnya sebuah pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrstruktur. Kemudian dilakukan wawancara bersama BPK. HY (KAUR keuangan) dan SN (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..memang untuk partisipasi masyarakat masih belum terlalu peduli dengan pengawasan dan pemantauan..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..saya melihat masih kurang perhatian masyarakat terhadap pengawasan, pengontrolan, dan pemantauan pembangunan yang dilakukan pemerintah, jadi menurut saya partisipasi masyarakat masih belum benar sadar..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Kemudian dilakukan wawancara bersama masyarakat mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan yakni AD, SI dan NL mengatakan bahwa:

“..masyarakat memang kurang memperhatikan dikarenakan kegiatannya, siang bertani ada di sawah dan kebun, sehingga tidak memperhatikan pengawasan dan pemantauan pembangunan jalan..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..saya tidak sempat memperhatikan dikarenakan kesibukan saya harus beladang di sawah atau kalau tidak di sawah ya dikebun..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..susah memang karena masyarakat punya kegiatannya masing-masing kalau siang, jadi mereka kurang memperhatikan..”(hasil wawancara 26 Mei 2021)

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator peran pengambil keputusan pada peran Kepala Kampung Tablasupa Distrik Depapre kabupaten Jayapura yakni pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam

memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah kampung masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan, kemudian mengenai keterlibatan BPD dalam pengawasan dan pemantauan kerja pelaksana pembangunan infrastruktur jalanan kampung, sudah pasti terlibat dikarenakan sudah menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan kampung dalam pengawasan pembangunan, namun masyarakat masih tidak mengetahui akibat kurangnya pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri. Dan partisipasi masyarakat mengenai pengawasan dan pemantauan berdasarkan pemerintah kampung bahwasannya partisipasi masyarakat masih kurang baik itu kurang kesadaran dan kurang pengetahuan pentingnya sebuah pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrstruktur. Serta kurangnya pertisipasi masyarakat di akibatkan oleh kesibukan yang dimiliki pada siang hari sehingga tidak bisa memperhatikan secara detail mengenai pengawasan dan pemantauan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat

Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yakni, Kepala Kampung, Sekertaris Kampung, KAUR Keuangan Kampung, Ketua BPD Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan indikator faktor pendukung pembangunan kampung, pada peran Kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai, partisipasi

masyarakat kampung mengenai, faktor yang mendukung pembangunan infrastruktur jalanan kampung, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama BPK. MS (Kepala Kampung) dan BPK. AY (sekertaris kampung) mengatakan bahwa:

*“..faktor pendukung dari pembangunan infrastruktur kampung khususnya ini pembangunan jalanan, yakni didukung dengan dana, dalam hal ini adalah APBD kampung yang diberikan kepada kampung untuk membangun, kemudian partisipasi masyarakat walaupun pada pengawasan yang kurang tapi partisipasi untuk mendukung pembangunan sangat besar, serta regulasi kita di dukung dengan regulasi yang baik *baik itu pemerintah pusat, provinsi hingga daerah..*” (hasil wawancara 15 Juni 2024)*

“..Puji Tuhan kita diberikan kemudahan, baik itu dari masyarakat dengan dukungan yang diberikan, pendanaan yang fokus kepada beberapa pembangunan saja dan beberapa hal teknis lainnya..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur kampung yang yakni adalah, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan kepada kampung untuk mengelola daerahnya menjadi lebih mudah. Kemudian selanjutnya wawancara bersama BPK. HY (KAUR keuangan) dan BPK. HO (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..Puji Tuhan ada banyak faktor yang mendukung berjalannya ini pembangunan infrastruktur kampung, khususnya jalanan ini pertama sya kira dari masyarakat sendiri dalam memberikan dukungan, selanjutnya pemerintah karena adanya program pemberian dana kampung APBD kampung yang jelas, kemudian regulasi yang sekarang kalau mau membangun tidak susah dan ribet lagi..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

*“..faktor pendukung ini dari masyarakat tentu karena memang pembangunan ini dilakukan atas dasar kebutuhan masyarakat, kemudian sekarang sudah enak dana APBD kampung sudah tidak seperti *dulu jadi semuanya sekarang serba mudah membangun..*”(hasil wawancara 15 Juni 2024)*

Jadi berdasarkan indikator faktor pendukung dari peran Kepala Kampung

dalam pembangunan infrastruktur jalan kampung di Kampung Tablasupa Distrik Depapre kabupaten Jayapura ini dapat disimpulkan faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur kampung yang yakni adalah, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan kepada kampung untuk mengelola daerahnya menjadi lebih mudah.

Berdasarkan indikator faktor penghambat pembangunan kampung, pada peran Kepala Kampung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura mengenai, partisipasi masyarakat kampung mengenai, faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur jalanan kampung, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama BPK. MS (Kepala Kampung) dan BPK. AY (sekertaris kampung) serta BPK. HO (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..ada beberapa yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan di kampung ini, masih belum maksimalnya pengawasan dan pemantuan pada pembangunan sehingga terjadi tarik ulur waktu sehingga membuat pembengkakan biaya, kemudian cuaca dan medan yang sulit di kampung ini, tidak bisa dilanjut juga kalau cuaca buruk dan memang pada dasarnya daerah ini medannya berat dikarenakan susahnya akses roda empat yang belum bisa masuk, dan terakhir harga material pembangunan yang mahal membuat pembengkakan biaya pada pembangunan ini..” (hasil wawancara 15 Juni 2024)

“..penghambat dari proses pembangunan infrastruktur kampung ini ada beberapa, yakni cuaca yang tidak menentu pada saat musim kemarau masih sering hujan, kemudian rentan banjir jalanan yang bagus rusak lagi, kenaikan harga material untuk pembangunan yang luar biasa juga..” (hasil wawancara 15 Juni 2024

“..faktor penghambat pembangunan ini biasanya karena faktor alam, jadi

curah hujan yang tidak menentu pasti menjadi penghambat itu saja menurut saya..(hasil wawancara 15 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara diatas mengenai faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan kampung, dapat disimpulkan ada beberapa hal yakni pertama belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur, kemudian cuaca dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan infrastruktur dan waktu yang lama, serta bahan material pembangunan yang semakin mahal menyebabkan pembengkakan biaya diluar perhitungan.